

PENGARUH KOMITE CSR TERHADAP ESG DISCLOSURE DENGAN DEWAN KOMISARIS PEREMPUAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN TAMBANG

Latifatul Ariqoh¹, Evi Ekawati², Ahmad Hazas Syarif^{3(*)}

¹⁻³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract

Environmental, Social, and Governance disclosure is a critical aspect of ensuring corporate sustainability, particularly in the mining sector. One governance mechanism frequently highlighted in improving the quality of sustainability disclosure is the presence of a CSR committee and a board of commissioners composed of women. Therefore, this study aims to analyze the influence of the CSR committee on ESG disclosure with a board of commissioners composed of women as a moderating variable. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from annual reports and corporate sustainability reports. The analysis employs descriptive statistics and was processed using IBM SPSS 25 software. The results indicate that the CSR committee has a significant positive effect on ESG disclosure. This finding indicates that the stronger the presence of a CSR committee within a company, the higher the level of ESG disclosure tends to be. Furthermore, the research results also show that the presence of female board members yields non-significant results. This indicates that the presence of women on boards of commissioners has not yet been able to encourage companies to improve transparency in disclosing information related to environmental, social, and corporate governance performance.

Kata Kunci: CSR committee, ESG Disclosure, Female Board Commissioners

Januari – Juni 2026, Vol 15 (1): hlm 104-122
©2026 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
All rights reserved.

(*) Korespondensi: latifahariqah4@gmail.com (L. Ariqoh), evi.ekawati@radenintan.ac.id (E. Ekawati), hazassyarif@radenintan.ac.id (A. H. Syarif)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri pertambangan di Indonesia saat ini menunjukkan peranan penting dalam menopang perekonomian nasional. Selain itu, perusahaan tambang tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, tetapi sektor ini juga sangat erat kaitannya dengan berbagai isu lingkungan, sosial, tatakelola yang mana saat ini kian menjadi sorotan publik. Industri pertambangan pada dasarnya merupakan industri yang tidak berkelanjutan karena sangat bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan perlu dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan aktivitas pertambangan, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga pasca penutupan tambang (Ningsih et al., 2021). Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian juga tercermin dari penerimaan negara yang berasal dari sektor mineral dan batubara (Minerba) yang pada tahun 2022 mencapai 127,9 triliun rupiah atau 301,88% dari target 42,37 triliun rupiah tercatat jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, sektor pertambangan kerap dianggap sebagai industri dengan dampak lingkungan yang besar. Aktivitas pertambangan yang lokasinya umumnya terpencil, kegiatannya luas, serta sering dikaitkan dengan isu lingkungan dan sosial, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari para pemangku kepentingan terhadap potensi risiko dan praktik yang tidak bertanggung jawab (Durlista & Wahyudi, 2023).

Selain memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, aktivitas pertambangan di Indonesia juga kerap menimbulkan berbagai persoalan yang berdampak pada lingkungan dan sosial. Salah satunya dapat dilihat dari kegiatan pertambangan nikel di beberapa wilayah yang memunculkan kekhawatiran terkait isu lingkungan. Peningkatan ekspansi tambang nikel untuk memenuhi kebutuhan bahan baku baterai kendaraan listrik mendorong pembukaan lahan hutan di berbagai daerah. Dalam dua dekade terakhir tercatat sekitar 24.811 hektar hutan telah mengalami pembukaan akibat aktivitas pertambangan di Indonesia (Indriastuti 2023).

Di samping itu aktivitas pertambangan juga kerap dikaitkan dengan penurunan kualitas lingkungan, salah satunya yaitu berupa pencemaran sumber air. Sebagai contoh, masyarakat di Halmahera Timur, Maluku Utara, mengeluhkan kondisi air Sungai Sangaji yang diduga mengalami pencemaran akibat aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tersebut. Perubahan kualitas air ini membuat masyarakat tidak lagi dapat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mencuci, maupun kegiatan pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab (Ajeng, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwasannya permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan masih menjadi isu yang sangat relevan. Kondisi ini juga berpotensi terjadi pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga penting untuk mengkaji bagaimana perusahaan mengungkapkan informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan melalui pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Oleh karena itu, Pengungkapan ESG saat ini bukan hanya sekedar suatu bentuk kepatuhan terhadap aturan, melainkan sesuatu yang memiliki nilai strategis lebih luas. Pertama, ESG sangat berperan penting sebagai sarana komunikasi bagi perusahaan untuk membangun reputasi yang baik sekaligus menjaga kepercayaan dari investor, karyawan, maupun masyarakat umum. Melalui reputasi baik yang ditopang oleh praktik ESG yang kuat dapat menjadi keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan. Kedua, ESG berperan sebagai instrumen proaktif untuk mengantisipasi dan mengelola berbagai risiko non-keuangan yang semakin relevan, seperti ancaman perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, isu hak asasi manusia, maupun masalah terkait tata kelola. Melalui proses identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko yang transparan, perusahaan dapat meminimalisir potensi kerugian operasional maupun finansial dimasa yang akan datang (Friede et al., 2015)

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi, salah satunya melalui penerbitan Peraturan OJK No. 51/Pojk.03/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, lembaga emiten, serta perusahaan publik. Regulasi ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pelaporan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, Governance*) (POJK, 2015).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terkait isu perubahan iklim, ketidakadilan sosial, serta tuntutan atas praktik tata kelola yang etis, baik investor institusional maupun individu kini semakin mempertimbangkan faktor-faktor ESG dalam proses pengambilan keputusan investasi. Dalam hal ini mereka tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi bagaimana caranya menciptakan dampak positif atau setidaknya meminimalkan dampak negatif dari investasi yang dilakukan (Gillan et al., 2021). Oleh karena itu, pengungkapan ESG saat ini bukan hanya sekedar pilihan, melainkan menjadi suatu keharusan strategis bagi perusahaan agar tetap relevan dan mampu bersaing dalam pasar global yang dinamis.

Dalam perspektif islam sudah dijelaskan bahwa tanggungjawab kita terhadap lingkungan bukan hanya sebagai kewajiban moral tetapi bagian dari ibadah. Fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia sejatinya telah mendapat perhatian dalam ajaran islam.

Dalam Al-Qur'an Surah Al A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat ini mengandung larangan manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Namun, di dunia saat ini, kepedulian manusia terhadap lingkungan sangatlah rendah. Akibatnya, tindakan mereka telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Aktivitas manusia telah merusak berbagai komponen lingkungan seperti, air yang tercemar limbah, manusia yang dirugikan oleh eksploitasi pertambangan besar-besaran, dan tumbuhan yang dihancurkan melalui

penebangan liar. Dalam konteks kekinian, kerusakan lingkungan tersebut tercermin dalam rendahnya kualitas pengungkapan ESG pada perusahaan pertambangan, yang seharusnya menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam melaporkan dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari kegiatan operasionalnya (Fadli et al., 2025).

Dalam konteks tata kelola perusahaan, perbedaan tingkat pengungkapan ESG diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal organisasi, khususnya yang berkaitan dengan komposisi dewan serta struktur komite yang berada dibawah naungan dewan tersebut. Misalnya, pembentukan komite *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki peran penting dalam mengarahkan serta mengawasi tanggung jawab sosial perusahaan agar pelaksanaannya lebih terintegrasi, transparan, dan selaras dengan tujuan keberlanjutan perusahaan (Eberhardt-Toth, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Aldogan Eklund & Pinheiro, 2024), yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menunjukkan kinerja ESG yang baik serta kebijakan kompensasi berbasis CSR lebih cenderung membentuk komite CSR, kondisi ini menunjukkan bahwa komite CSR bukan hanya pelengkap tata kelola, melainkan mekanisme yang efektif dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan keberlanjutan

Sementara itu, dewan komisaris perempuan diyakini memiliki wawasan yang lebih luas diberbagai bidang karena latar belakang profesionalnya, seperti sebagai tenaga ahli disektor pendukung bisnis atau individu yang memiliki pengaruh di masyarakat, bukan hanya semata-mata sebagai pakar bisnis internal. Kondisi ini mendorong mereka untuk lebih mampu mengajukan solusi alternatif serta berperan aktif dalam menangani berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi perusahaan (Romano et al., 2020). Perspektif ini didasarkan pada argumen bahwa perempuan cenderung memiliki sifat lebih teliti, berhati-hati, menghindari risiko. Serta dianggap berintegritas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan perusahaan (Miglani & Ahmed, 2019).

Meskipun demikian, terdapat celah yang signifikan terkait bagaimana mekanisme pengawasan internal perusahaan, khususnya melalui pembentukan komite yang berfokus pada isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Seperti penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil terkait dengan minimnya pembentukan komite keberlanjutan di indonesia yang menunjukkan hanya sekitar 6,6% perusahaan yang memiliki komite keberlanjutan yang berkaitan erat dengan dewan direksi. Angka ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap isu keberlanjutan belum menjadi fokus utama di beberapa perusahaan (Mufida & Syafruddin, 2023).

Di sisi lain, hubungan antara komite CSR dengan ESG *disclosure* tidak selalu linier. Disinilah peran dewan komisaris perempuan menjadi signifikan sebagai variabel moderasi. Endraswati (2016) dalam (Gunawan & Wijaya, 2021) Menjelaskan bahwa peranan perempuan disektor perekonomian dapat merambah hingga sektor eksekutif, yang artinya keberadaan perempuan perempuan dalam *corporate board* diyakini akan membawa dampak positif bagi perusahaan. kehadiran komisaris wanita sering kali menyumbangkan perspektif yang berbeda dan lebih sensitif terhadap masalah sosial dan lingkungan, yang dapat mendorong perusahaan lebih aktif dalam pengungkapan ESG. Selain itu, keberadaan komisaris wanita dapat mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi, yang pada

akhirnya dapat memperkuat kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan (Khemakhem et al., 2023).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena menawarkan pembaharuan dalam mengkaji pengaruh komite komisaris CSR terhadap pengungkapan keberlanjutan dengan menambahkan dewan komisaris perempuan sebagai variabel moderasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas kedua faktor ini secara terpisah atau pada sektor berbeda, sehingga masih terdapat kekosongan empiris terkait pengaruh kolektifnya, terutama pada industri pertambangan yang memiliki risiko sosial dan lingkungan yang tinggi. Penelitian ini juga menekankan peran karakteristik perempuan, seperti kehati-hatian, orientasi jangka panjang, dan integritas, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan ESG. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur tata kelola perusahaan dan ESG sekaligus memberikan implikasi praktis bagi regulator, investor, dan perusahaan pertambangan dalam memperkuat praktik keberlanjutan yang strategis dan bermakna.

Urgensi dari penelitian ini juga terletak pada kebutuhan akan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hubungan literatur tata kelola perusahaan dan pengungkapan ESG dengan menghadirkan bukti empiris baru dari perspektif negara berkembang seperti Indonesia, dimana faktor budaya dan regulasi lokal kerap memoderasi hubungan antara mekanisme *governance* dan praktik keberlanjutan. Khususnya pada industri ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi komoditas dan tekanan global. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya praktik pengungkapan ESG di sektor pertambangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Kemudian temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan, investor, serta pembuat kebijakan dalam meningkatkan transparansi, keberlanjutan, dan nilai jangka panjang perusahaan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh komite komisaris CSR terhadap pengungkapan ESG dengan dewan komisaris perempuan sebagai variabel moderasi pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang secara utama berlandaskan pada paradigma postpositivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya, yaitu seperti melibatkan pemikiran tentang hubungan sebab-akibat, reduksi pada variabel, hipotesis, serta pertanyaan-pertanyaan spesifik melalui pengukuran, observasi, dan pengujian teori (Ardiawan et al., 2022).

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan komponen penelitian yang mencakup objek dan subjek yang memiliki ciri-ciri khusus (Amin et al., 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah 36 perusahaan tambang dalam sektor energi yang terdaftar dalam Bursa efek Indonesia selama periode 2020-2024. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan dengan kriteria tertentu, yaitu:

1. Perusahaan tambang dalam sektor energi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024.
2. Perusahaan menyediakan data yang diperlukan peneliti, yaitu *Sustainability Report* dan *Annual Report* selama tahun 2020-2024.
3. Perusahaan tambang dalam sektor energi yang melakukan pelaporan ESG berturut selama tahun 2020-2024.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 12 perusahaan tambang dalam sektor energi yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang akan dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ESG Disclosure*. *ESG Disclosure* sebagai ukuran pengungkapan mengenai aspek Lingkungan (E), Sosial (S), dan Tata Kelola (G) oleh perusahaan yang menunjukkan keterbukaan dan komitmen terhadap suatu perusahaan.

Pengukuran pengungkapan ESG dilakukan dengan menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*. *Global Reporting Initiative Standards* adalah standar internasional yang sering digunakan dalam pelaporan keberlanjutan. GRI menyediakan panduan terperinci terkait elemen-elemen yang harus dilaporkan, terkait dengan aspek-aspek keberlanjutan seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial (Athaya Artanti Hanafi et al., 2025).

Pada penelitian ini, pengungkapan ESG diukur dengan menggunakan standar *Global Reporting Initiative (GRI)*. Perusahaan dapat menerapkan pengungkapan ESG berdasarkan GRI 300 terkait aspek lingkungan (*environmental*) dengan 30 indikator pengungkapan, GRI 400 terkait topik sosial (*social*) dengan 34 indikator pengungkapan, serta GRI 102 terkait topik tata kelola (*governance*) dengan 22 indikator pengungkapan (Global Reporting Initiative, 2016). Selanjutnya, tingkat Pengungkapan ESG dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus rasio sebagai berikut:

$$ESG \frac{\sum n}{\sum k} \times 100\%$$

Keterangan:

ESG= *Environmental, Social, Governance*

$\sum n$ = Jumlah indikator yang diungkapkan perusahaan

$\sum k$ = Jumlah indikator dari keseluruhan

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau yang disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komite CSR. Komite CSR merupakan subkomite dibawah dewan direksi yang memiliki tanggung jawab utama terkait isu-isu sosial dan lingkungan (Velte and Stawinoga 2020).

Kemudian dalam penelitian ini, setiap perusahaan menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut komite ini. Beberapa perusahaan menyebutnya sebagai *Sustainability Committee, ESG Committee, Environmental & Social Committee*, atau *Corporate Responsibility Committee* (Gennari, 2019).

Komite komisaris CSR dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Variabel *Dummy*, yaitu:

Score 0: Jika perusahaan tidak mengungkapkan item komite tersebut.

Score 1: Jika perusahaan mengungkapkan item komite tersebut

3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel ketiga yang memengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris Perempuan.

Dewan komisaris merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang bertugas untuk mengawasi serta memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Secara konseptual, dewan komisaris perempuan mengacu pada representasi gender perempuan dalam susunan dewan komisaris perusahaan, yang mana kehadiran mereka diyakini mampu memperkuat pengawasan yang lebih etis serta mampu mendorong pengungkapan informasi keberlanjutan melalui sudut pandang yang lebih beragam (Al-Shaer et al., 2024).

Dewan komisaris perempuan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus rasio yaitu:

$$DKP = \frac{\text{jumlah komisaris perempuan}}{\text{jumlah total komisaris}} \times 100\%$$

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan berkelanjutan (*sustainability report*)

perusahaan tambang. Data tersebut dapat diakses melalui situs resmi perusahaan melalui website Bursa Efek Indonesia.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder, data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya dan diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung atau pihak kedua, misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah ataupun perpustakaan (Hardani et al., 2020). Penelitian memerlukan data laporan berkelanjutan perusahaan tambang yang tersedia melalui website resmi Bursa Efek Indonesia.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data dari responden atau sumber lain terkumpul. Kemudian, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, dan diolah menggunakan *software* SPSS. Uji kualitas data dalam penelitian ini yaitu melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal, dengan acuan nilai signifikansi $> 0,05$. Kemudian uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen, yang dilihat dari nilai VIF < 10 dan tolerance $> 0,10$. Sementara itu, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas.

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan nilai signifikansi $< 0,05$. selain itu, penelitian ini juga menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA) yang digunakan untuk menguji peran variabel moderasi dalam hubungan antar variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan proses mengubah data penelitian ke dalam bentuk tabulasi agar lebih mudah untuk dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Melalui statistik deskriptif, peneliti dapat memperoleh informasi seperti ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan atau pola yang muncul dari suatu kumpulan data (Dahri, 2020). Hasil pengujian data tersebut menampilkan informasi penting seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai maksimum dan minimum dari variabel yang diteliti.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KCSR	60	0	1	0.55	0.502
ESG	60	0.10	0.91	0.4658	0.20633
DKP	60	0	0.33	0.0921	0.12311
Valid (listwise)	N 60				

Sumber: Hasil olah data SPSS, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4 diatas, diketahui jumlah sampel yang digunakan pada masing-masing variabel yang diteliti adalah sebanyak 60. Nilai minimum menggambarkan nilai terendah dari setiap variabel penelitian, sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi yang diperoleh. Nilai mean mencerminkan rata-rata dari masing-masing variabel, sementara standar deviasi menunjukkan tingkat variasi atau sebaran data dalam penelitian. Berikut ini adalah analisis dari masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Variabel komite CSR memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum sebesar 1, dengan nilai rata-rata sebesar 0,55 serta standar deviasi sebesar 0,502. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan dalam sampel penelitian telah membentuk komite CSR. Kemudian, standar deviasi yang relatif mendekati nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data komite CSR antar perusahaan dalam penelitian ini tergolong cukup bervariasi.
- b. Variabel *ESG disclosure* memiliki nilai minimum sebesar 0,10 dan nilai maksimum sebesar 0,91, dengan nilai rata-rata sebesar 0,4658 dan standar deviasi sebesar 0,20633. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ESG perusahaan dalam sampel penelitian berada pada tingkat sedang, dengan standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data pengungkapan ESG antar perusahaan tidak terlalu jauh dari nilai rata-ratanya.
- c. Variabel dewan komisaris perempuan memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0,33, dengan nilai rata-rata sebesar 0,0921 serta standar deviasi sebesar 0,12311. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai dewan komisaris perempuan pada perusahaan dalam sampel penelitian tergolong relatif rendah, dengan standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa terdapat variasi data yang cukup besar antar perusahaan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dapat terdistribusi secara normal atau tidak. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *kolmogorov-smirnov*. Model regresi dapat dikatakan baik apabila nilai signifikan hasil perhitungan data (sig) > 0,05 maka

data terdistribusi secara normal, sebaliknya jika (sig) < 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal(Sahir, 2021).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				Unstandardized Residual
N				60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean			0
	Std. Deviation			0.19088860
Most Extreme Differences	Absolute			0.139
	Positive			0.064
	Negative			-0.139
Test Statistic				0.139
Asymp. Sig. (2-tailed)				0.006 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.			0.175 ^d
	95% Confidence Interval	Lower Bound		0.165
		Upper Bound		0.185

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil olah data SPSS, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, terlihat bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig*) sebesar 0,006, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (sig) <0,05. Karena hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal, maka uji normalitas dilakukan dengan pendekatan *Monte Carlo*, dari tabel 5 diatas diketahui bahwasannya nilai signifikansi (*Monte Carlo Sig 2-tailed*) sebesar 0,175 menunjukkan nilai ini lebih besar dari (sig) >0,5 yang berarti hal ini menunjukkan residu dari nilai ini memenuhi asumsi normalitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Uji multikoloniaritas dapat dilakukan dengan mencari nilai VIF (*Variance inflation factors*). Jika nilai VIF menunjukkan angka yang tinggi maka terjadi gejala multikolonieritas. Sebaliknya, semakin rendah nilai VIF semakin rendah derajat multikolonieritas yang terjadi. Batasan nilai maksimum VIF yang biasa digunakan untuk menandakan adanya indikator multikolonieritas adalah ≤ 10 atau nilai *tolerance* ≥ 0.01 (Imam Ghozali, n.d.).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Komite CSR	0.945	1.058
	Dewan Komisaris Perempuan	0.945	1.058

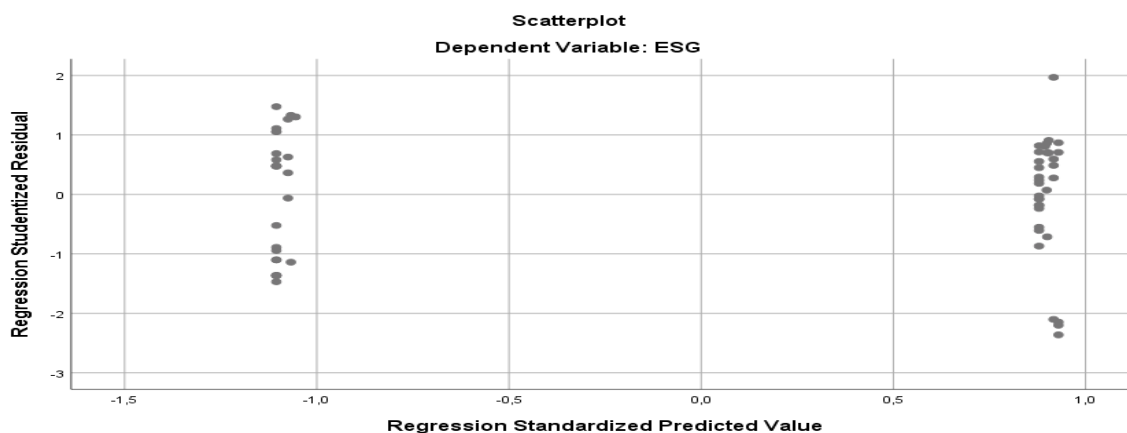
a. Dependent Variable: ESG

Sumber: Hasil olah data SPSS, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* sebesar 0,945 lebih dari nilai 0,1 dan *Variance Inflation Factor* sebesar 1,058 lebih kecil dari 10,0. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pada penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas yang artinya variabel tersebut tidak memiliki korelasi tinggi dengan variabel lainnya dalam model dan hasil regresi dapat diinterpretasikan dengan baik.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas.



Sumber: Hasil olah data SPSS, data diolah peneliti (2026)

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4 diatas, dapat dilihat *scatterplot* yang menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas maupun dibawah garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan hasil analisis regresi dapat dianggap reliabel.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan (p-value) dibandingkan dengan tingkat signifikan 0,05 (taraf signifikan $\alpha=5\%$). Jika p-value < 0,05 maka variabel independen dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.380	0.037		10.256	0.000
	X1	0.156	0.050	0.379	3.124	0.003

a. Dependent Variable: ESG

Sumber: Hasil olah data SPSS, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 6 diatas, diketahui hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel komite CSR dengan ESG *disclosure* sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,124. dapat disimpulkan bahwa variabel komite CSR (X1) berpengaruh signifikan terhadap ESG *disclosure* (Y).

Uji Moderated Regression Analisis (MRA)

Uji *Moderated Regression Analisis* (MRA) bertujuan untuk menganalisis efek interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Variabel moderasi merupakan variabel yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan dependen (Hatta Setiabudhi, 2024).

Tabel 6. Hasil Uji Moderated Regression Analisis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.380	0.037		10.285	0.000
	X1M	-0.299	0.259	-0.164	-1.154	0.253

a. Dependent Variable: ESG

Sumber: Hasil olah data SPSS, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji *moderated regression analisis* yang tersaji pada tabel 5 diatas, diperoleh informasi bahwa hubungan antara komite CSR terhadap dewan komisaris perempuan ($X*Z$) menunjukkan nilai sebesar 0,253 nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya komite CSR tidak mampu memoderasi pengaruh komite CSR terhadap dewan komisaris perempuan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentase variasi variabel independen, dimana dari variasi persentase variabel independen tersebut akan menentukan variasi perubahan pada variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	0.404 ^a	0.164	0.134		0.19199

a. Predictors: (Constant), X1M, KCSR

Sumber : Hasil olah data SPSS, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 7 diatas, diketahui nilai *R-square* (R) sebesar 0,164 hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi mengindikasikan bahwa masing-masing variabel independen berkontribusi sebesar 16,4% terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Komite CSR Terhadap ESG Disclosure

Komite CSR merupakan salah satu struktur dalam perusahaan yang secara khusus dibentuk untuk mengelola serta mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Keberadaan komite ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan tuntutan legitimasi perusahaan, tetapi juga berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan serta memastikan bahwa proses assurance terhadap laporan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, pemahaman terkait komite CSR, baik secara konseptual maupun praktis, menunjukkan bahwasannya keberadaan komite CSR dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara komite CSR sebagai variabel independen dan ESG disclosure sebagai variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan dampak pengaruh komite CSR yang diukur dengan skala dummy. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite CSR berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ESG, dengan pembuktian nilai *t-statistics* yang dihasilkan senilai 3.124 dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Hasil tersebut berarti menunjukkan bahwa semakin optimal peran komite CSR dalam suatu perusahaan, maka tingkat pengungkapan ESG yang dilakukan juga cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa komite CSR mampu mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan.

Temuan ini sejalan dengan teori *stakeholder*, yang menyatakan bahwasannya tata kelola perusahaan harus memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penelitian (Nugroho & Hersugondo Hersugondo, 2022) menjelaskan bahwasannya *stakeholder* mencakup investor, masyarakat di sekitar area tambang, pemerintah dan karyawan yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Investor membutuhkan informasi terkait ESG sebagai dasar

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, masyarakat berkepentingan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan, sementara itu pemerintah berperan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi regulasi yang berlaku, sedangkan karyawan memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan serta kondisi kerja yang layak. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi melalui pengungkapan ESG.

Selain itu, temuan ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif ekoteologi islam. Dalam ajaran islam, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan (QS. Al-A'raf: 56). dalam konteks perusahaan, hal tersebut menunjukkan bahwa peran komite CSR dalam mendorong pengungkapan ESG merupakan suatu bentuk upaya perusahaan dalam menjalankan amanah tersebut, khususnya melalui transparansi terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas operasionalnya. Dengan demikian, keberadaan komite CSR tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tata kelola, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Qaderi et al., 2022) yang menjelaskan bahwasannya perusahaan yang memiliki komite CSR umumnya dianggap lebih bertanggung jawab dalam menjalankan praktik keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwasannya keberadaan komite CSR dapat meningkatkan kualitas, relevansi, dan keterbukaan pelaporan keberlanjutan perusahaan. hal ini dikarenakan komite CSR tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses penyusunan laporan serta memberikan kontribusi dalam memastikan informasi yang disampaikan lebih komprehensif. Selain itu, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Baraibar-Diez & Odriozola, 2019) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komite CSR cenderung memiliki skor pengungkapan ESG yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite CSR. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan yang memiliki komite CSR cenderung menunjukkan kinerja non-keuangan yang lebih baik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena komite tersebut berperan dalam mengawasi pelaksanaan keberlanjutan serta memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan turut dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan perusahaan.

Pengaruh Dewan komisaris Perempuan Dalam Memoderasi Komite CSR Terhadap ESG Disclosure

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris perempuan tidak memoderasi hubungan antara komite CSR dengan ESG *disclosure*. Hal ini terlihat pada tabel 9 yang menunjukkan bahwa variabel moderasi memiliki nilai 0,253 lebih besar dari nilai 0,05 sehingga hasilnya tidak signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris perempuan tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh komite CSR terhadap pengungkapan kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dengan kata lain, komite CSR mampu memiliki pengaruh langsung terkait praktik keberlanjutan perusahaan, namun pengaruh tersebut tidak

dipengaruhi dengan adanya peran dewan komisaris perempuan sebagai mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan.

Secara teoritis, berdasarkan teori peran sosial, perempuan cenderung memiliki karakter komunal yang lebih peduli terhadap aspek lingkungan dan sosial. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tersebut tidak secara otomatis tercermin dalam praktik pengambilan keputusan di tingkat dewan komisaris. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan peran komisaris perempuan dalam struktur organisasi, serta masih dominannya pengaruh komisaris laki-laki dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori *nature*, yang menyatakan bahwa perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan tidak selalu signifikan dalam konteks organisasi. Kemudian Putri dan NR (2019) dalam (Razak & Helmy, 2020) juga menjelaskan bahwa teori *nature* belum sepenuhnya mampu menjelaskan penelitian mengenai gender ini. Hal tersebut karena teori *nature* tumbuh dan berkembang di negara barat. Konsep ini ada yang tidak bisa diterapkan di negara tertentu, seperti Indonesia dengan negara yang didominasi oleh masyarakat mayoritas muslim. Teori ini mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita baik secara biologis maupun secara sosial, namun teori ini belum memberikan batasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik gender sebagaimana dijelaskan dalam teori *nature* tidak selalu tercermin dalam konteks organisasi, karena proses pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh struktur tata kelola, regulasi perusahaan, serta pembagian peran formal dalam dewan komisaris.

Dalam perspektif Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah, dengan potensi yang sama untuk berprestasi, serta tidak dibedakan secara hierarkis dalam peran dan tanggung jawabnya. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam Islam yang menempatkan setiap individu secara proporsional tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender (Sipayung, 2023). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang gender dalam posisi kesetaraan nilai kemanusiaan, bukan sebagai penentu dominasi atau keunggulan peran tertentu. Dengan demikian, meskipun Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sebagai individu yang memiliki tanggung jawab moral, dalam praktik organisasi, perbedaan gender ini tidak secara langsung dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris perempuan dalam struktur tata kelola perusahaan belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara terhadap pengungkapan ESG. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengungkapan ESG lebih banyak dipengaruhi oleh struktur mekanisme tata kelola formal seperti keberadaan komite CSR, dibandingkan dengan karakteristik demografis dewan.

Kondisi ini juga dapat dijelaskan bahwa kehadiran perempuan dalam jajaran dewan komisaris belum mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam pengungkapan informasi terkait kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah bahwa peran dewan komisaris perempuan dalam perusahaan lebih berfokus pada pengawasan kinerja keuangan dan strategi bisnis, sehingga perhatian terhadap isu keberlanjutan

dan tanggung jawab sosial belum menjadi fokus utama. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Yuniarti et al., 2023) yang menyatakan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Kondisi ini menyebabkan keberadaan dewan komisaris tidak memberikan kontribusi tambahan yang signifikan terhadap efektivitas komite CSR dalam meningkatkan praktik pengungkapan ESG perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Zachry, 2025) yang menjelaskan bahwasannya keberagaman dalam dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Kemudian, hasil penelitian (Gavana et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberagaman gender dalam dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ESG. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Nurbaity et al., 2025) yang menyatakan bahwa keragaman gender tidak dapat memengaruhi kinerja pengungkapan ESG. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan belum tentu dapat memoderasi hubungan antara komite CSR terhadap kebijakan keberlanjutan perusahaan dalam pengungkapan ESG.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh komite CSR terhadap ESG *disclosure* dengan dewan komisaris perempuan sebagai variabel moderasi pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel komite CSR berpengaruh positif signifikan terhadap ESG *disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal peran komite CSR dalam suatu perusahaan, maka tingkat transparansi dalam pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan semakin meningkat. Sementara itu, dewan komisaris perempuan tidak mampu memoderasi hubungan antara komite CSR terhadap ESG *disclosure*. Hal ini dikarenakan keterlibatan dewan komisaris perempuan dalam perusahaan lebih berfokus pada pengawasan kinerja keuangan dan strategi bisnis, sehingga perhatian terhadap isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial belum menjadi fokus utama.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwasannya keberadaan komite CSR memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi terhadap pengungkapan ESG perusahaan. Sementara itu, keberadaan dewan komisaris perempuan tidak hanya perlu dilihat dari sisi kuantitas saja, tetapi juga dilihat dari kualitas peran, kompetensi, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap praktik keberlanjutan perusahaan.

Kemudian penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang terbatas pada perusahaan sektor pertambangan serta periode penelitian yang relatif singkat, yaitu 2020-2024. Selain itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas sehingga belum mampu menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi pengungkapan ESG.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke sektor lainserta menambah variabel yang relevan agar dapat

memberikan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode analisis yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan ESG.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, T. (2025). *Miris! Nasib Warga di Maluku Utara di Tengah Aktivitas Tambang: Air Tercemar, Hidup Terancam?* Kompas. <https://www.kompas.tv/regional/606837/miris-nasib-warga-di-maluku-utara-di-tengah-aktivitas-tambang-air-tercemar-hidup-terancam>
- Al-Shaer, H., Zaman, M., & Albitar, K. (2024). CEO gender, critical mass of board gender diversity and ESG performance: UK evidence. *Journal of Accounting Literature*, May. <https://doi.org/10.1108/JAL-10-2023-0181>
- Aldogan Eklund, M., & Pinheiro, P. (2024). The determinants of corporate social responsibility (CSR) committee: executive compensation, CSR-based incentives and ESG performance. *Social Responsibility Journal*, 20(7), 1240–1255. <https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2022-0303>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Pilar*, 14(1), 15–31.
- Ardiawan, K. N., Sari, M. E., Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., & Hasda, S. (2022). Penelitian kuantitatif. *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Athaya Artanti Hanafi, Candratika Widayati Lestari, Erlinda Maretnaningsih Suwarno, & Luthifa Salsabilla Arifin. (2025). Analisis Pengungkapan Sustainability Reports Berdasarkan Gri Standards Pada Perusahaan Energi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 326–343. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.1028>
- Baraibar-Diez, E., & Odriozola, M. D. (2019). CSR committees and their effect on ESG performance in UK, France, Germany, and Spain. *Sustainability (Switzerland)*, 11(18). <https://doi.org/10.3390/su11185077>
- Dahri, M. (2020). Jenis Variabel Dan Skala Pengukuran, Perbedaan Statistik Deskriptif Dan Inferensial. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Durlista, M. A., & Wahyudi, I. (2023). Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social Dan Governance (Esg) Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Periode 2017-2022 *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 7(3), 210–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3327>
- Eberhardt-Toth, E. (2017). Who should be on a board corporate social responsibility committee? *Journal of Cleaner Production*, 140, 1926–1935. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.127>
- Fadli, M., Huda, M. S., Alfarizi, M., Putri, U., & Majid, A. (2025). Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 Perspektif Tafsir Maqashidi. *Qur'ania*:

Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 1(2), 14–28.

- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 5(4), 210–233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Gavana, G., Gottardo, P., & Moisello, A. M. (2024). The impact of board gender diversity on ESG disclosure. A contingency perspective. *Meditari Accountancy Research*, 33(7), 1–29. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2024-2567>
- Gennari, F. (2019). How to lead the board of directors to a sustainable development of business with the CSR committees. *Sustainability (Switzerland)*, 11(24). <https://doi.org/10.3390/su11246987>
- Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889>
- Global Reporting Initiative. (2016). Consolidated Set of Gri. *GRI Standards*, 1–443.
- Gunawan, B. V., & Wijaya, H. (2021). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 61–69. <https://doi.org/10.33508/jima.v10i2.3563>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Hatta Setiabudhi. (2024). *Analisis Data Kuantitatif Menggunakan SmartPLS 4*. 1–104. <https://ebooks.borneonovelty.com/media/publications/588838-analisis-data-kuantitatif-dengan-smartpl-29069ce4.pdf>
- Imam Ghozali. (n.d.). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (B. P. U. Diponegoro (ed.)).
- INDRIASTUTI, F. (2023). *Tambang Nikel dan Dampak Deforestasi*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2023/07/17/160000726/tambang-nikel-dan-dampak-deforestasi?page=all>
- Khemakhem, H., Arroyo, P., & Montecinos, J. (2023). Gender diversity on board committees and ESG disclosure: evidence from Canada. *Journal of Management and Governance*, 27(4), 1397–1422.
- Miglani, S., & Ahmed, K. (2019). Gender diversity on audit committees and its impact on audit fees: evidence from India. *Accounting Research Journal*, 32(4), 568–586. <https://doi.org/10.1108/ARJ-01-2018-0001>
- Mufida, I., & Syafruddin, M. (2023). Pengaruh Tata Kelola Terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12, 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ningsih, N. W., Putrawan, R., Ekawati, E., & Isnaeni, A. (2021). Environmental Performance and Company Size on the Financial Performance of Sharia

- Companies in Indonesia. *Finance, Accounting and Business Analysis*, 3(1), 2021. <http://faba.bg>
- Nugroho, N. A., & Hersugondo Hersugondo. (2022). Analisis Pengaruh Environment, Social, Governance (ESG) Disclosure Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 233–243. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v15i2.810>
- Nurbaity, C., Zarefar, A., & Rasuli, M. (2025). Gender Diversity Dan Kinerja Esg : Peran Moderasi Gender Equality Pada Perusahaan Non Keuangan Di Indonesia. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 6(3), 765–776. <https://doi.org/10.31258/current.6.3.765-776>
- Qaderi, S. A., Ghaleb, B. A. A., Hashed, A. A., Chandren, S., & Abdullah, Z. (2022). Board Characteristics and Integrated Reporting Strategy: Does Sustainability Committee Matter? *Sustainability (Switzerland)*, 14(10). <https://doi.org/10.3390/su14106092>
- Razak, B., & Helmy, H. (2020). Pengaruh Dewan Direksi Wanita, Dewan Komisaris Wanita Dan Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dan Menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun 2015-2018) Bimahadi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3434–3451.
- Romano, M., Cirillo, A., Favino, C., & Netti, A. (2020). ESG (Environmental, social and governance) performance and board gender diversity: The moderating role of CEO duality. *Sustainability (Switzerland)*, 12(21), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su12219298>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sipayung, A. S. (2023). Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Pendekatan Library Research. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 98. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.22076>
- Velte, P., & Stawinoga, M. (2020). Do chief sustainability officers and CSR committees influence CSR-related outcomes? A structured literature review based on empirical-quantitative research findings. In *Journal of Management Control* (Vol. 31, Issue 4). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s00187-020-00308-x>
- Yuniarti, R., Sumarlan, A., Junaidi, A., & Riswandi, P. (2023). Peran Kinerja Lingkungan pada Pengaruh Gender Diversity terhadap Kinerja Keuangan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 713–722.
- Zachry, F. dan E. (2025). Pengaruh ukuran dewan, dewan komisaris independen, dan keragaman gender di dewan terhadap pengungkapan esg. 14(April 2019), 1–12.